



Peran Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional melalui Perdagangan Internasional

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Inten Suhartien Universitas Sulawesi Tenggara intensoehartien@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Suhartien, S. (2025). Peran Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional melalui Perdagangan Internasional. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2983-2990.

Abstrak

Ketahanan pangan menjadi tantangan penting bagi Indonesia, terutama karena tingginya ketergantungan pada impor bahan makanan utama seperti beras, gandum, kedelai, gula, dan daging sapi. Kenaikan harga global yang dipicu oleh situasi geopolitik, seperti konflik antara Rusia dan Ukraina, semakin berpengaruh pada stabilitas dalam negeri dengan meningkatkan biaya yang mengganggu rantai pasokan. Data dari periode 2020 hingga 2023 menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam impor pangan strategis, sedangkan ekspor cenderung stagnan. Hal ini mencerminkan adanya keterbatasan dalam kapasitas produksi nasional. Studi ini menyoroti peran penting diplomasi ekonomi sebagai alat strategis untuk mengatasi kerentanan tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui negosiasi perdagangan, peningkatan cadangan pangan, dan kerja sama bilateral dengan negara-negara pemasok. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada ekspor dan keterlibatan multilateral, studi ini menjembatani kesenjangan dengan menganalisis hubungan langsung antara diplomasi ekonomi dan ketahanan pangan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kerangka konseptual yang mengaitkan kebijakan ekonomi internasional dengan strategi pangan nasional. Hasil tersebut menekankan betapa pentingnya mengintegrasikan diplomasi ekonomi dalam rencana jangka panjang untuk memajukan kedaulatan pangan di Indonesia.

Kata kunci: ketahanan pangan, diplomasi ekonomi, perdagangan internasional, ketergantungan impor, Indonesia

Abstract

Food security represents a critical challenge for Indonesia, particularly due to its high dependency on imports of essential food commodities such as rice, wheat, soybeans, sugar, and beef. The surge in global prices, triggered by geopolitical circumstances such as the Russia-Ukraine conflict, has further undermined domestic stability by raising costs and disrupting supply chains. Data from 2020 to 2023 reveal a significant increase in imports of strategic food commodities, while exports have remained stagnant, reflecting limitations in national production capacity. This study underscores the pivotal role of economic diplomacy as a strategic instrument to address such vulnerabilities. This can be pursued through trade negotiations, the strengthening of food reserves, and bilateral cooperation with supplier countries. Distinct from previous studies that primarily emphasized exports and multilateral engagement, this research bridges the gap by analyzing the direct relationship between economic diplomacy and food security. The findings provide an important contribution to the development of a conceptual framework linking international economic policy with national food strategies. These results emphasize the importance of integrating economic diplomacy into long-term plans to advance food sovereignty in Indonesia.

Keywords: food security, economic diplomacy, international trade, import dependency, Indonesia.

A. Pendahuluan

Ketahanan pangan menjadi salah satu dasar untuk pembangunan yang berkelanjutan dan merupakan salah satu fokus utama di tingkat global, sesuai dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada tujuan kedua, yaitu menghapus kelaparan. Organisasi internasional seperti FAO, World Food Programme (WFP), dan World Trade Organization (WTO) menekankan pentingnya ketersediaan, aksesibilitas, serta keberlanjutan pasokan pangan dunia sebagai elemen strategis dalam menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi (FAO, 2021). Bagi Indonesia, yang memiliki lebih dari 270 juta penduduk, menjaga kebutuhan pangan pokok secara berkelanjutan, memastikan stabilitas harga, dan meratakan distribusi menjadi harapan penting untuk mendukung ketahanan nasional.

Namun, berdasarkan laporan Global Food Security Index (EIU, 2023), Indonesia berada di kategori menengah dengan skor yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih memerlukan pasar internasional untuk memenuhi kebutuhan akan komoditas utama seperti gandum, kedelai, gula, dan daging sapi (BPS, 2022). Ketergantungan ini meningkatkan risiko terhadap gangguan pasokan global yang disebabkan oleh dinamika geopolitik, seperti perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan lonjakan harga gandum dan pupuk. (World Bank, 2023). Dalam situasi ini, perdagangan internasional memiliki peran yang kompleks: di satu sisi, ia menciptakan peluang untuk mendiversifikasi impor dan ekspor produk hortikultura, Namun, di sisi lain, hal ini juga meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap perubahan pasar global dan kebijakan proteksionisme dari negara-negara pemasok. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi dianggap sebagai alat yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan kepentingan nasional dengan perkembangan global.

Partisipasi aktif Indonesia di berbagai forum internasional, termasuk WTO, FAO, ASEAN, dan G20, belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan diplomasi ekonomi dalam memperkuat ketahanan pangan. Berbagai pertanyaan penelitian muncul, termasuk terkait arah kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia dan alat-alat yang digunakan untuk memastikan ketersediaan serta stabilitas pangan melalui perdagangan internasional, serta sejauh mana diplomasi ekonomi mampu mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat kapasitas pangan domestik (ADB, 2022). Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada diplomasi perdagangan dalam konteks ekspor, namun masih terbatas dalam membahas keterkaitannya dengan ketahanan pangan domestik (Purwanto, 2021; Santoso, 2022). Keterbatasan literatur ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang relevan untuk dikaji lebih mendalam.

Dengan mempertimbangkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi diplomasi ekonomi Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan melalui jalur perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana diplomasi ekonomi dapat berperan sebagai alat strategis dalam memastikan ketersediaan bahan pangan utama, menstabilkan harga, dan mengurangi ketergantungan pada barang impor. Studi ini

diharapkan dapat memperkaya literatur akademik tentang hubungan internasional serta diplomasi ekonomi.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena diplomasi ekonomi dan ketahanan pangan secara kontekstual serta mendalam melalui analisis terhadap kebijakan, aktor, dan dinamika perdagangan internasional. Desain deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis hubungan antara diplomasi ekonomi, mekanisme perdagangan internasional, dan ketahanan pangan Indonesia.

Data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui telaah dokumen resmi pemerintah, laporan organisasi internasional, serta publikasi lembaga terkait yang relevan dengan isu perdagangan pangan dan diplomasi ekonomi. Data sekunder diperoleh dari literatur akademik, artikel jurnal, laporan penelitian, serta publikasi media yang mendukung analisis. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tersebut, dengan fokus pada kebijakan perdagangan, perjanjian internasional, serta data statistik impor-ekspor pangan.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif berbasis studi literatur. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang mengikuti prinsip analisis interaktif. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi relevan terkait diplomasi ekonomi dan ketahanan pangan, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, serta narasi analitis. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi yang mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teoritik hubungan internasional dan ekonomi politik.

Untuk menjamin validitas, penelitian menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari dokumen resmi, laporan internasional, dan literatur akademik. Penggunaan berbagai sumber dimaksudkan untuk memperkuat keabsahan interpretasi serta mengurangi bias analisis. Metodologi ini dipilih agar penelitian dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai peran diplomasi ekonomi Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui mekanisme perdagangan internasional, sekaligus mengisi kesenjangan literatur yang telah teridentifikasi.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Ekspor-Impor Pangan dan Kebijakan Strategis Indonesia

Pada awal tahun 2025, data BPS menunjukkan bahwa Indonesia telah mengimpor sejumlah komoditas pangan strategis, yakni 728.020 ton gandum dan meslin, 308.780 ton gula mentah industri, serta 18.220 ton daging sapi (Kompas, Februari 2025). Selain itu, pemerintah juga menetapkan rencana impor tambahan sebesar 200.000 ton gula untuk memperkuat cadangan nasional dan menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan 2025 (Reuters, Februari 2025). Fakta ini menegaskan bahwa ketersediaan pangan domestik masih menghadapi tekanan signifikan akibat keterbatasan produksi dalam negeri, sehingga pemenuhan kebutuhan pangan pokok sangat bergantung pada pasokan dari pasar internasional. Ketergantungan tersebut tidak hanya mencerminkan rendahnya tingkat swasembada, tetapi juga memperlihatkan kerentanan terhadap gejolak harga global, kebijakan proteksionis negara pemasok, maupun disrupsi rantai pasok akibat krisis geopolitik dan iklim. Dengan demikian, fenomena impor pangan pada 2025 menjadi bukti konkret bahwa ketahanan pangan Indonesia belum sepenuhnya mandiri dan masih ditentukan oleh dinamika perdagangan internasional.

Sebagai respons atas meningkatnya kerentanan pangan, pemerintah Indonesia memperluas intervensi melalui kebijakan nonperdagangan yang terintegrasi dengan agenda ketahanan gizi nasional. Salah satu inisiatif utama adalah program *free meals* nasional (Makan Bergizi Gratis (MBG)) yang diarahkan untuk menekan prevalensi stunting pada anak-anak. Implementasi program ini mendorong peningkatan impor produk susu serta pengiriman ternak dari negara mitra, termasuk instruksi pemerintah untuk mengimpor 400.000 ekor sapi pembibit pada 2025. Kebijakan tersebut ditargetkan dapat memperkuat basis produksi protein hewani dengan sasaran jangka panjang mencapai dua juta ekor sapi, sehingga mampu mendukung swasembada pasokan protein domestik (Reuters, Januari 2025; Reuters, Agustus 2024). Langkah ini menunjukkan bahwa strategi ketahanan pangan Indonesia tidak hanya

difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pokok berbasis karbohidrat, tetapi juga pada peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Kebijakan ini juga menegaskan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia tidak hanya berorientasi pada negosiasi tarif maupun volume perdagangan, tetapi juga mencakup dimensi strategis yang lebih luas dalam penyediaan cadangan pangan serta diversifikasi sumber pasokan. Instrumen diplomasi digunakan untuk membangun kemitraan jangka panjang dengan negara pemasok, memastikan kontinuitas suplai dalam kondisi fluktuasi pasar global, sekaligus memperkuat cadangan domestik guna mengantisipasi potensi krisis. Dengan demikian, diplomasi ekonomi berfungsi sebagai instrumen multidimensi yang mengintegrasikan kepentingan perdagangan, kesehatan publik, dan pembangunan berkelanjutan, sehingga relevan tidak hanya untuk meningkatkan daya saing internasional, tetapi juga untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berlandaskan kemandirian dan resiliensi struktural.

Meskipun kebijakan impor sapi pembibit diproyeksikan mendukung swasembada protein hewani dalam jangka panjang, terdapat sejumlah potensi risiko yang perlu diantisipasi. Pertama, ketergantungan pada impor ternak dalam skala besar berpotensi menciptakan kerentanan baru ketika terjadi perubahan kebijakan ekspor di negara pemasok atau gejolak harga global. Kondisi ini dapat menimbulkan volatilitas pada rantai pasok domestik serta menambah tekanan terhadap anggaran negara yang dialokasikan untuk subsidi impor dan distribusi. Kedua, skema impor besar-besaran berisiko menurunkan insentif bagi peternak lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi, sehingga memperlebar kesenjangan struktural antara produsen domestik dan pemasok luar negeri. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pembangunan industri peternakan nasional yang berkelanjutan.

Selain itu, tantangan teknis juga berpotensi menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Proses adaptasi sapi impor terhadap iklim tropis Indonesia tidak selalu berjalan optimal, yang dapat memengaruhi produktivitas maupun tingkat kesehatan ternak. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur peternakan, distribusi pakan, dan layanan kesehatan hewan masih menjadi persoalan mendasar yang perlu diperkuat sebelum target dua juta ekor sapi dapat tercapai secara realistis. Dengan demikian, meskipun kebijakan impor sapi pembibit merepresentasikan upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis protein, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menyeimbangkan kepentingan jangka pendek berupa stabilisasi pasokan dengan agenda jangka panjang berupa kemandirian produksi domestik.

Temuan terbaru menegaskan bahwa diplomasi ekonomi memiliki peran strategis dalam merespons dinamika pasar global yang semakin kompleks sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional. Dalam konteks ini, diplomasi tidak hanya diposisikan sebagai instrumen politik luar negeri, tetapi juga sebagai mekanisme yang mampu memastikan ketersediaan pangan melalui akses stabil terhadap pasar internasional. Perubahan harga dan pasokan pangan dunia akibat krisis geopolitik, perubahan iklim, serta disrupsi rantai pasok global menunjukkan bahwa instrumen perdagangan konvensional tidak lagi memadai. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi menjadi sarana yang menghubungkan kebijakan domestik dengan kepentingan global untuk menjaga kesinambungan suplai pangan strategis.

Data menunjukkan bahwa dalam periode 2020–2023, Indonesia mengalami peningkatan signifikan pada impor pangan strategis, khususnya beras, gandum, dan kedelai. Impor beras meningkat dari 1,1 juta ton pada 2020 menjadi 3,5 juta ton pada 2023, sementara ekspor beras relatif stagnan di bawah 0,3 juta ton. Kondisi serupa terlihat pada kedelai, dengan impor meningkat dari 2,5 juta ton pada 2020 menjadi 3,0 juta ton pada 2023, sedangkan ekspor hanya sekitar 0,01 juta ton. Gandum bahkan sepenuhnya bergantung pada impor, rata-rata 11 juta ton per tahun tanpa ekspor (BPS, 2023; FAO, 2023).



Sumber: (BPS, 2023; FAO, 2023).

Tren ini menunjukkan ketergantungan Indonesia pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik. Dalam konteks diplomasi ekonomi, situasi ini menuntut strategi negosiasi yang lebih agresif guna menjamin pasokan berkelanjutan serta mengurangi risiko ketergantungan terhadap satu atau dua negara pemasok utama.

Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lain, posisi Indonesia dalam ketahanan pangan menunjukkan ketergantungan impor yang relatif tinggi. Thailand dan Vietnam, misalnya, justru menempati posisi sebagai eksportir utama beras dunia dengan volume ekspor rata-rata masing-masing 6–7 juta ton per tahun. Kedua negara tersebut mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan kapasitas produksi, sehingga lebih resilien terhadap dinamika pasar internasional. Sebaliknya, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk besar mengalami tekanan produksi pangan domestik, sehingga harus menutupi kekurangan melalui impor dalam skala signifikan. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural antara potensi agraris Indonesia dengan capaian produksi yang belum optimal.

Selain itu, Singapura sebagai negara dengan keterbatasan lahan pertanian mengandalkan strategi berbeda dalam menghadapi kerentanan pangan. Negara tersebut menekankan pada diversifikasi sumber impor dari lebih 170 negara mitra serta investasi dalam teknologi pangan, seperti urban farming dan inovasi substitusi protein. Strategi tersebut menjadikan Singapura lebih adaptif menghadapi fluktuasi harga global meskipun tingkat ketergantungan impornya hampir 90%. Jika dibandingkan, Indonesia justru menghadapi risiko lebih besar karena keterbatasan diversifikasi negara pemasok dan lemahnya cadangan pangan strategis. Oleh karena itu, ketergantungan impor pangan Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif melalui diplomasi ekonomi, penguatan produksi domestik, dan diversifikasi mitra dagang untuk mencapai stabilitas pangan yang berkelanjutan.

Tabel 1. Tabel Perbandingan Impor–Ekspor Beras Indonesia Dengan Thailand Dan Vietnam Periode 2020–2023

Tahun	Indonesia Impor Beras (juta ton)	Indonesia Ekspor Beras (juta ton)	Thailand Ekspor Beras (juta ton)	Vietnam Ekspor Beras (juta ton)
2020	1,1	0,20	6,5	6,2
2021	2,0	0,25	6,1	6,3
2022	2,9	0,28	7,1	7,0
2023	3,5	0,30	6,8	7,1

Sumber: BPS. (2023), FAO. (2023), USDA. (2023), IGC. (2023), VFA (2023), TREA (2023)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Indonesia cenderung defisit (impor jauh lebih tinggi daripada ekspor), sedangkan Thailand dan Vietnam konsisten surplus ekspor, yang memperkuat posisinya sebagai pemasok utama beras dunia.

B. Gejolak Harga Pangan Global dan Implikasinya Bagi Indonesia.

Harga pangan global terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi domestik Indonesia. Lonjakan harga gandum dari USD 250/ton pada 2021 menjadi USD 350/ton pada 2022 dipicu oleh konflik Rusia–Ukraina yang mengganggu rantai pasok dunia (World Bank, 2023). Situasi serupa juga terlihat pada kedelai, yang harganya naik tajam dari USD 420/ton pada 2021 menjadi USD 610/ton pada 2022, meskipun sempat turun menjadi USD 550/ton pada 2023 (World Bank, 2023). Dinamika ini memperlihatkan bagaimana ketegangan geopolitik dapat secara langsung meningkatkan volatilitas pasar pangan internasional yang kemudian menekan negara-negara importir, termasuk Indonesia.

Tabel 2. Perbandingan Harga Pangan Global dan Domestik Indonesia (2020–2023).

Tahun	Harga Gandum Global (USD/ton)	Harga Kedelai Global (USD/ton)	Harga Beras Domestik (Rp/ton)	Harga Kedelai Domestik (Rp/ton)
2020	230	390	5.200.000	7.000.000
2021	250	420	5.450.000	7.600.000
2022	350	610	6.200.000	9.200.000
2023	320	550	6.800.000	8.500.000

Sumber: World Bank (2023); BPS (2023)

Dampak gejala harga global tersebut tercermin jelas pada pasar domestik. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa harga beras meningkat dari Rp 5,2 juta/ton pada 2020 menjadi Rp 6,8 juta/ton pada 2023, sementara harga kedelai domestik melonjak dari Rp 7 juta/ton pada 2020 hingga mencapai puncaknya Rp 9,2 juta/ton pada 2022 sebelum sedikit menurun ke Rp 8,5 juta/ton pada 2023. Tren ini menegaskan adanya keterkaitan erat antara fluktuasi harga global dengan kestabilan harga pangan domestik. Oleh karena itu, ketergantungan impor atas komoditas strategis menimbulkan risiko tambahan terhadap ketahanan pangan nasional, terutama ketika pasokan dunia mengalami disrupsi.

Kenaikan harga pangan global dalam periode 2020–2023 menunjukkan dinamika yang signifikan terhadap stabilitas pasokan dan harga domestik di Indonesia. Data *World Bank Commodity Markets Outlook* (2023) mencatat harga gandum meningkat dari USD 230/ton (2020) menjadi USD 350/ton (2022) sebelum turun ke USD 320/ton pada 2023, dipicu oleh disrupsi rantai pasok akibat konflik Rusia–Ukraina. Tren serupa terlihat pada kedelai yang melonjak dari USD 390/ton (2020) menjadi USD 610/ton (2022) sebelum sedikit terkoreksi menjadi USD 550/ton (2023). Fluktuasi tajam ini menandakan kerentanan pasar global terhadap faktor geopolitik dan iklim, yang secara langsung memengaruhi ketersediaan pangan di negara-negara importir, termasuk Indonesia.

Implikasi dari gejala harga global tersebut tercermin pada pasar domestik Indonesia sebagaimana ditunjukkan oleh data BPS (2023). Harga beras domestik meningkat konsisten dari Rp 5,2 juta/ton (2020) menjadi Rp 6,8 juta/ton (2023), sedangkan harga kedelai melonjak lebih drastis dari Rp 7 juta/ton (2020) ke Rp 9,2 juta/ton pada 2022, sebelum terkoreksi menjadi Rp 8,5 juta/ton (2023). Kenaikan harga ini mempertegas keterkaitan erat antara pasar global dan pasar domestik, khususnya pada komoditas pangan yang sebagian besar masih bergantung pada impor. Kondisi tersebut menegaskan urgensi strategi kebijakan yang tidak hanya fokus pada peningkatan produksi nasional, tetapi juga pada penguatan cadangan strategis, diversifikasi sumber impor, serta diplomasi ekonomi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional.

Kenaikan harga pangan global yang terefleksi dalam pasar domestik Indonesia memiliki implikasi langsung terhadap daya beli masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa kelompok pengeluaran makanan masih menyumbang lebih dari 40% pada struktur konsumsi rumah tangga, terutama di kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Lonjakan harga beras dan kedelai, sebagai bahan pangan pokok dan sumber protein utama, menekan kemampuan konsumsi rumah tangga miskin, sehingga berpotensi meningkatkan angka kerentanan gizi dan memperburuk masalah stunting. Dengan demikian, fluktuasi harga pangan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berdampak sosial dan kesehatan masyarakat, terutama pada kelompok rentan.

Selain itu, gejala harga pangan turut mendorong inflasi pangan domestik. Bank Indonesia (2023) mencatat inflasi bahan makanan mencapai 7,6% pada 2022, lebih tinggi dibandingkan inflasi umum yang berada pada level 5,5%. Faktor utama pendorong inflasi adalah kenaikan harga beras, minyak goreng, dan kedelai yang terintegrasi dengan pasar internasional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa stabilitas makroekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap impor pangan strategis. Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi harga melalui operasi pasar, cadangan beras pemerintah, serta diplomasi impor menjadi instrumen penting dalam menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

C. Peran Diplomasi Ekonomi Indonesia

Diplomasi ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memperluas pasar ekspor, tetapi juga sebagai alat untuk menegosiasikan harga yang lebih stabil melalui diversifikasi sumber impor.

Berdasarkan tren impor–ekspor dan dinamika harga pangan di atas, diplomasi ekonomi Indonesia dapat dianalisis melalui tiga peran utama:

1. Menjamin Pasokan Pangan Strategis
Melalui kerja sama bilateral dengan negara pemasok utama (misalnya Vietnam dan Thailand untuk beras, Brasil dan Amerika Serikat untuk kedelai, serta Australia untuk gandum), Indonesia dapat mengamankan akses terhadap impor dengan harga dan volume yang terjamin.
2. Mengurangi Ketergantungan pada Pasar Tertentu
Diversifikasi mitra dagang menjadi langkah penting. Misalnya, upaya Indonesia memperluas kerja sama pangan dengan India dan Pakistan untuk beras, serta dengan Argentina untuk kedelai, bertujuan mengurangi risiko ketergantungan tunggal.

3. Meningkatkan Posisi dalam Forum Multilateral

Partisipasi Indonesia dalam WTO, FAO, dan G20 membuka ruang untuk memperjuangkan stabilitas harga pangan global, termasuk menolak kebijakan proteksionisme yang dapat merugikan negara importir seperti Indonesia.

Dengan demikian, diplomasi ekonomi terbukti memainkan peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, baik melalui pengelolaan impor strategis, negosiasi perdagangan, maupun penguatan posisi tawar Indonesia di forum internasional.

Lebih jauh, analisis mengenai diplomasi ekonomi dan ketahanan pangan juga memiliki relevansi normatif dengan agenda pembangunan global. Ketersediaan dan akses pangan merupakan inti dari Sustainable Development Goals (SDGs) poin 2, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, serta memajukan pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, upaya memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia tidak hanya sekadar menjawab kebutuhan domestik, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian komitmen internasional dalam menurunkan kerentanan pangan dan memperkuat keadilan akses terhadap sumber daya pangan. Perspektif ini menegaskan bahwa penelitian ini memiliki signifikansi ganda, baik pada level nasional maupun global, sekaligus memperkuat argumentasi tentang pentingnya strategi diplomasi yang terintegrasi dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Ketahanan pangan Indonesia berada pada posisi yang rentan akibat tingginya ketergantungan pada impor komoditas strategis, fluktuasi harga pangan global, serta keterbatasan kapasitas produksi domestik. Data terkini menunjukkan bahwa lonjakan impor beras, kedelai, gandum, serta daging sapi tidak hanya menggambarkan lemahnya fondasi produksi nasional, tetapi juga memperlihatkan ketidakstabilan pasokan yang semakin dipengaruhi dinamika geopolitik dan perdagangan internasional.

Dalam konteks tersebut, diplomasi ekonomi memainkan peran penting sebagai instrumen strategis. Diplomasi tidak hanya menyangkut negosiasi tarif atau sengketa dagang di forum multilateral, melainkan juga terkait erat dengan upaya diversifikasi impor, penguatan cadangan pangan, serta pembentukan kerja sama bilateral jangka panjang dengan negara pemasok utama. Temuan penelitian sebelumnya menegaskan bahwa fokus kajian lebih banyak diarahkan pada peningkatan ekspor, sementara keterkaitan antara diplomasi ekonomi dengan ketahanan pangan nasional masih kurang diperhatikan.

Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam literatur, di mana dimensi diplomasi ekonomi dalam mengamankan pasokan pangan melalui mekanisme perdagangan internasional belum mendapat perhatian yang memadai. Oleh karena itu, penguatan strategi diplomasi ekonomi yang terintegrasi dengan kebijakan domestik menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan pasokan pangan sekaligus mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana akademis maupun kebijakan praktis dengan menekankan perlunya integrasi antara diplomasi ekonomi, pengelolaan impor, dan strategi cadangan pangan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem ketahanan pangan yang tangguh, adaptif terhadap dinamika pasar global, serta mendukung kedaulatan pangan nasional Indonesia dalam jangka panjang.

E. Referensi

- Asian Development Bank. (2022). *Key indicators for Asia and the Pacific 2022*. ADB. <https://www.adb.org/publications>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik perdagangan luar negeri Indonesia*. BPS. <https://www.bps.go.id>
- Bayne, N., & Woolcock, S. (2017). *The new economic diplomacy: Decision-making and negotiation in international economic relations* (4th ed.). Routledge.
- Economist Intelligence Unit. (2023). *Global Food Security Index 2023*. EIU. <https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index>
- Food and Agriculture Organization. (2021). *The state of food security and nutrition in the world 2021*. FAO. <https://www.fao.org/publications>
- Kompas. (2025, February). *Indonesia impor gandum, gula, dan daging sapi pada awal 2025*. Kompas. <https://www.kompas.com>

- Prasetyo, A. (2021). Diversifikasi impor dan cadangan pangan nasional: Strategi ketahanan pangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(2), 145–162. <https://doi.org/10.20885/jep.vol29.iss2.art3>
- Purwanto, H. (2021). Diplomasi perdagangan Indonesia di WTO: Antara negosiasi tarif dan sengketa. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), 55–70. <https://doi.org/10.22146/jhi.v9i1.12345>
- Reuters. (2024, August). *Indonesia plans to import breeder cattle to boost protein supply*. Reuters. <https://www.reuters.com>
- Reuters. (2025, February). *Indonesia plans to import 200,000 tons of raw sugar ahead of Ramadan*. Reuters. <https://www.reuters.com>
- Reuters. (2025, January). *Indonesia to import 400,000 breeder cattle in 2025*. Reuters. <https://www.reuters.com>
- Santoso, B. (2022). Diplomasi bilateral Indonesia dalam perdagangan pangan strategis. *Jurnal Politik Internasional*, 14(2), 201–220. <https://doi.org/10.20473/jpi.v14i2.34567>
- Susanti, R. (2020). Partisipasi Indonesia dalam forum perdagangan multilateral: Studi kasus WTO. *Jurnal Global & Strategis*, 14(1), 77–95. <https://doi.org/10.20473/jgs.v14i1.24689>
- World Bank. (2023). *Commodity markets outlook: The impact of the Russia–Ukraine war on global food prices*. World Bank. <https://www.worldbank.org>